



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Meninbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik sebagai upaya pencegahan korupsi di jajaran Pemerinta Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditanda tangani Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur pada tanggal 22 Januari 2009;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Implementasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa rencana aksi implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 5;

Menperhatikan: Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SKB/01/M.PAN/01/2009 dan Nomor: 119/394/PEM.D/I/2009 tanggal 22 Januari 2009;

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati Ini, diatur Rencana Aksi Implementasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2013.

Pasal 2

Rencana Aksi Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana aksi implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Tim Monitoring Rencana Aksi Implementasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan rencana aksi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 25.

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 OKTOBER 2011**

**RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011-2013**

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemerintah	1. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja					
		a. Penyusunan RPJP 2005-2025	- Tersusunnya RPJP Kab. PPU Tahun 2005-2025	√	-	-	Bappeda
		b. Penyusunan KUA dan PPAS	- Tersusunnya KUA dan PPAS Kabupaten PPU	√	√	√	Bappeda
		c. Penyusunan Renstra Kab dan OPD Tahun 2008-2013 (Review)	- Tersusunnya Renstra Kab dan OPD (Review)	√	-	-	Bappeda, Seluruh OPD
			- Jumlah OPD yang mereview Renstra	√	-	-	Seluruh OPD
		d. Penyusunan Rencana Kinerja OPD	- Jumlah OPD yang menyusun Renja	√	√	√	Bappeda, Seluruh OPD
		e. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	- Tersusunnya Indikator Kinerja Utama	√	√	√	Bagian Ortala, Seluruh OPD
			- Jumlah OPD yang menyusun Indikator Kinerja Utama	√	√	√	Seluruh OPD
		f. Penyusunan Penetapan Kinerja	- Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten PPU	√	√	√	Bagian Ortala, Seluruh OPD
			- Jumlah OPD yang menyusun Penetapan Kinerja	√	√	√	Seluruh OPD
		g. Penyusunan LAKIP	- Tersusunnya LAKIP Kabupaten PPU	√	√	√	Bagian Ortala, Inspektorat
			- Jumlah OPD yang Menyusun LAKIP	√	√	√	Seluruh OPD
		h. Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Kinerja	- Tersusunnya Pedoman Evaluasi AKIP	√	-	-	Inspektorat
			- Tersusunnya Pedoman Anggaran Berbasis Kinerja	√	-	-	Bappeda, Bag. Keuangan, Bag. Pembangunan
- Tersusunnya Pedoman Penerapan Sistem AKIP	√		-	-	Inspektorat		
- Tersusunnya pedoman penyusunan Renstra	-		-	√	Bappeda		

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
		i. Sistem informasi manajemen barang daerah yang sudah ter-update	- Jumlah OPD yang menerapkan SIMBADA	√	√	-	Bag. Perlengkapan, Seluruh OPD
		j. Pengembangan dan implementasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) OPD	- Jumlah OPD yang menerapkan SIPKD	√	√	-	Bagian Keuangan
			- Jumlah OPD yang menerapkan SIKD	√	√	-	
		k. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	- Terlaksananya evaluasi AKIP di seluruh OPD	√	√	√	Inspektorat
		l. Review Laporan Keuangan	- Persentase keberhasilan pencapaian target kinerja OPD	√	√	√	Inspektorat
		m. Pendataan LP2P	- Tersedianya data LP2P seluruh Pegawai golongan III ke atas	√	√	√	Inspektorat
		n. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	- Terlaksananya pengawasan internal	√	√	√	Inspektorat
		o. Pembentukan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	- Terbentuknya majelis pertimbangan TP-TGR	√	-	-	Inspektorat
		p. Pelatihan/Bimtek/sosialisasi Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja	- Jumlah Pelatihan / Bimtek yang dilaksanakan	√	√	√	BKD, Seluruh OPD
			- Jumlah peserta pelatihan / BIMTEK	√	√	√	BKD, dan Seluruh OPD
		q. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang efektif, akuntabel dan Transparansi	- Tersusunnya Perbup tentang Sistem dan Proses penyaluran Bantuan Sosial	√	-	-	Bagian Kesra
2	Menurunnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa	2. Pelaksanaan Pencegahan Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik					
		a. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Tersusunnya Perbup tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	-	-	Bagian Perlengkapan

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
		b. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dengan Sistem e-Procurement	- Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa	√	-	-	Bagian Ortala
			- Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (e-Procurement)	√	-	-	Bagian Ortala
			- Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit LPSE	√	-	-	Bagian Ortala
			- Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan dengan e-procurement	√	√	√	ULP
			- Jumlah peserta pengadaan barang dan jasa yang melakukan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa	√	√	√	ULP
		c. Inventarisasi aset Daerah	- Jumlah aset yang masuk dalam Laporan inventarisasi barang Daerah	√	√	√	Bagian Perlengkapan, Seluruh OPD
			- Tersusunnya Neraca Daerah	√	√	√	Bagian Keuangan
		d. Penyusunan Standar Harga Barang/ Jasa	- Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa	√	√	√	Bappeda, Bag. Perlengkapan
		e. Pelatihan/Bimtek/sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Pelatihan / Bimtek yang dilaksanakan	√	√	√	BKD
			- Jumlah peserta Pelatihan / Bimtek	√	√	√	BKD
			- Jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa	√	√	√	BKD
		3.	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat	3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat			
a. Membuka layanan pengaduan masyarakat melalui media cetak	- Tersedianya Kolom Pengaduan masyarakat melalui SMS ke "Kriing Bupati"			√	√	√	Bagian Humas dan Protokol
b. Pembuatan kotak pengaduan masyarakat (kotak Pos)	- Tersedianya Kotak Pengaduan masyarakat			√	√	-	Inspektorat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
		c. Pembuatan kotak saran pada OPD	- Jumlah OPD yang membuat kotak saran	√	√	-	Inspektorat Daerah Seluruh OPD
		d. Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan	- Terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan	√	√	-	Inspektorat Daerah
		e. Bimbingan dan pengembangan jaringan Kominfo	- Tersedianya menu buku tamu pada website www.penajamkab.go.id	√	-	-	Bagian Humas dan Protokol
		f. Penguatan pusat pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan dan anak	- Terbentuknya sekretariat P2TP 2A	√	-	-	Kantor KB dan PP
4.	Terciptanya Manajemen Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	4. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemda					
		a. Review Peraturan tentang Peningkatan Kapasitas Pemda	- Jumlah Peraturan tentang Kelembagaan Perangkat Daerah yang direview	√	√	√	Bagian Organisasi
			- Peraturan tentang Hubungan Kerja di lingkungan Pemkab. PPU	√	-	-	Bagian Ortala
		b. Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	- Jumlah OPD yang telah menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	√	√	√	Bagian Ortala, Seluruh OPD
		c. Penyusunan standar kompetensi jabatan PNS	- Tersusunnya standar kompetensi PNS	-	√	-	Bagian Ortala, BKD, Seluruh OPD
		d. Assessment/uji kompetensi PNS	- Terlaksananya uji kompetensi PNS	-	-	√	BKD
		e. Penataan dan Pendayagunaan Aparatur	- Jumlah OPD yang menyusun uraian tugas (<i>job description</i>)	√	√	√	Bagian Ortala, Seluruh OPD
			- Tersusunnya Perbup penegakan jam kerja	√	-	-	Bagian Ortala
			- Pemberian sanksi kepada Pegawai yang melanggar disiplin pegawai	√	√	√	BKD, Seluruh OPD
		f. Sosialisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60/2008	- Terlaksananya SPIP	√	√	-	Inspektorat
		g. Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD, LKPJ, dan ILPPD)	- Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD, LKPJ dan ILPPD)	√	√	√	Bappeda, Bag.Pem Um, Bag. Keuangan, seluruh OPD

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
		h. Penyusunan peta jabatan	- Tersusunnya peta jabatan	√	√	√	Bagian Ortala
		i. Penyusunan uraian jabatan	- Tersusunnya uraian jabatan struktural	√	√	√	Bagian Ortala
			- Tersusunnya uraian jabatan fungsional	√	√	√	Bagian Ortala
		j. Penyusunan formasi PNS	- Tersedianya formasi PNS sesuai kebutuhan	√	√	√	BKD, seluruh OPD
		k. Penyusunan jenis jabatan fungsional	- Tersusunnya jenis jabatan fungsional	√	√	√	Bagian Ortala
		l. Pembentukan pakta integritas	- Jumlah pejabat yang menandatangani pakta integritas	√	√	√	Bagian Ortala
		m. Pemberian reward kepada PNS yang mempunyai masa kerja di atas 10 tahun	- Jumlah PNS penerima satya lencana	√	√	√	BKD
		n. Pengembangan sistem informasi kepegawaian Daerah	- Terpenuhinya informasi pegawai	√	√	√	BKD
		o. Penerimaan CPNS sesuai formasi	- Terlaksananya test pengadaan CPNS sesuai formasi	-	√	√	BKD
		p. Penghargaan peningkatan pendidikan PNS	- Terlaksananya kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah	√	√	√	BKD
		q. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal	- Terlaksananya pemberian tugas belajar dan izin belajar sesuai ketentuan	√	√	√	BKD
		r. Evaluasi kelembagaan dan pembentukan kelembagaan	- Jumlah kelembagaan yang dievaluasi	√	√	√	Bagian Ortala
		s. Penyusunan tugas pokok dan fungsi	- Jumlah Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi OPD	√	√	√	Bagian Ortala
		t. Pelatihan/Bimtek/sosialisasi/ diseminasi Penerapan Manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	- Jumlah pelatihan / bimtek / sosialisasi / diseminasi	√	√	√	BKD, Seluruh OPD
			- Jumlah peserta	√	√	√	Bag. Pemerintahan
		u. Lomba Camat dan Lurah Teladan	- Jumlah Camat yang mengikuti Lomba	√	√	√	
			- Jumlah Lurah yang mengikuti Lomba	√	√	√	
		v. Sosialisasi sistem komputerisasi Kearsipan	- Jumlah peserta	√	-	-	Bagian Umum Setkab

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5. Pelaksanaan Pelayanan Sektor Publik					
		a. Peningkatan kualitas pelayanan publik	- Jumlah OPD yang menyusun SOP	√	√	-	Bagian Ortala, Seluruh OPD
			- Jumlah urusan Standar Pelayanan Minimal yang disusun	√	√	-	Bagian Ortala, Seluruh OPD
			- Jumlah OPD yang melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat	-	√	-	Bagian Ortala
			- Jumlah OPD/Unit Kerja yang mengikuti kompetisi pelayanan publik	-	√	-	Bagian Ortala
		b. Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	- Terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	√	-	-	Bagian Ortala
			- Jumlah perizinan yang dilaksanakan BP2T- PM	√	√	√	BP2T - PM
		c. Pemberian KTP, KK dan Akta Kelahiran gratis	- Jumlah penduduk yang mendapat KTP, KK dan Akta Kelahiran gratis	√	√	√	Dukcatpil
		d. Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk ber KTP Kab. PPU	- Jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan Kesehatan gratis	√	√	√	Dinas Kesehatan
		e. Pemberian pendidikan gratis bagi penduduk ber KTP Kab. PPU (wajib belajar 12 tahun)	- Jumlah siswa SD, SLTP dan SLTA yang mendapat pendidikan gratis	√	√	√	Dinas Pendidikan
		f. Operasional Puskesmas 24 jam	- Jumlah Puskesmas yang membuka pelayanan 24 jam	√	√	√	Dinas Kesehatan
		g. Pelatihan / Bimtek / sosialisasi / diseminasi Penerapan Manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	- Jumlah pelatihan / bimtek / sosialisasi yang dilaksanakan	√	√	√	BKD
			- Jumlah peserta pelatihan / bimtek / sosialisasi	√	√	√	
h. Sertifikasi tanah masyarakat	- Jumlah masyarakat yang mendapat SHM gratis	-	√	√	Bag. Pemerintahan		
i. Implementasi sistem administrasi kependudukan (SIAK)	- Persentase penertiban dokumen dan administrasi kependudukan	√	√	√	Dukcatpil		

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
		j. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Gakin	- Terjangkaunya pelayanan KB bagi keluarga miskin di wilayah Galsikas	√	√	√	Kantor KB dan PP
		k. Penyelenggaraan paket belajar A,B dan C	- Jumlah Peserta	√	√	√	Disdikpora
		l. Penyelenggaraan RSBI di SMPN 5	- Terselenggaranya RSBI	√	√	-	Disdikpora
		m. Peningkatan mutu sekolah	- Sekolah penerima ISO 9001 : 2008	√	√	√	Disdikpora
		n. Pengembangan pendidikan keaksaraan	- Jumlah warga buta aksara yang mendapat pendidikan	-	√	-	Disdikpora
6.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat tentang anti korupsi dan perilaku Koruptif	6. Pemberian Pendidikan dalam peningkatan Kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif					
		a. Sosialisasi anti KKN	- Jumlah Sosialisasi	√	√	√	Inspektorat, BNK
		b. Pemasangan poster, stiker, dll	- Jumlah poster, stiker dan leaflet dibuat, dipasang dan disebar	√	√	√	Inspektorat, BNK
		c. Penetapan Wilayah Bebas KKN	- Jumlah OPD/Kecamatan sebagai wilayah bebas korupsi	√	√	√	Inspektorat
		d. Pelaksanaan Inpres Nomor 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah Penyelenggara Negara wajib Laporan LHKPN	√	√	√	Bagian Ortala, Seluruh OPD
			- Jumlah Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN	√	√	√	Bagian Ortala, Seluruh OPD
7.	Meningkatnya Akses Informasi	7. Pemberian akses Informasi					
		a. Penetapan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu	- Ditetapkannya PPID dan PPID Pembantu	√	-	-	Dinas Hubbudpar
			- Jumlah PPID Pembantu	√	-	-	
		b. Pengembangan sistem Informasi penanaman modal	- Tersedianya akses informasi bagi investor	√	-	-	Bagian Ekonomi
		c. Pembuatan database sistem informasi pemerintahan dan layanan Publik	- Tersedianya akses informasi pemerintahan bagi masyarakat	√	-	-	Bagian Pemerintahan

NO.	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN (Tahun)			PENANGGUNGJAWAB / PELAKSANA
				2011	2012	2013	
		d. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	- Tersedianya informasi mengenai stok permintaan kualitas barang, jalur distribusi, harga dan pelaku usaha komoditas potensial	√	-	-	Dinas KUKM perindag
		e. Penyusunan database perindustrian	- Tersedianya data pelaku IKM / UKM, manajemen bahan baku, dll	√	-	-	Dinas KUKM perindag
		f. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	- Jumlah laporan dan basis data	√	√	√	Kantor Lingkungan Hidup
		g. Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan Publik	- Tersedianya sistem informasi kegiatan Anggota DPRD	√	√	√	Sekretariat DPRD
		h. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Kominfo	- Tersedianya database sarana dan prasarana Bidang Kominfo	√	-	-	Dishubpar
		i. Pengembangan jaringan Pendidikan Nasional	- Terselenggaranya sistem jaringan Diknas	√	-	-	Disdikpora
8.	Meningkatnya Wawasan Sumber Daya Aparatur	8. Pelaksanaan pelatihan dan bantua teknis					
		a. Pelatihan dan Bimbingan Teknis	- Jumlah pelatihan / Bimtek	√	√	√	Kementerian PAN - RB
		b. Supervisi	- Laporan Hasil Supervisi	√	√	√	Kementerian PAN - RB
		c. Monitoring dan Evaluasi	- Laporan hasil monitoring dan Evaluasi	√	√	√	Kementerian PAN - RB

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP